

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman.

Tulisan yang diterbitkan Jurnal Masyarakat Budaya (JMB) kali ini cukup beragam. Sepuluh tulisan membahas berbagai isu sosial-kemasyarakatan, yaitu kearifan lokal, budaya demokrasi, budaya korupsi, dan sejarah. Keragaman tulisan yang dimuat JMB diharapkan dapat semakin memberikan manfaat kepada seluruh pembaca di masa depan.

Ada empat artikel yang mendiskusikan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat berbentuk cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebenarnya menggambarkan pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal melalui kumpulan pengalaman yang diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat.

Tulisan pertama dalam edisi jurnal kali ini membahas tentang etnobotani. Etnobotani biasanya memfokuskan pada pendokumentasian dan penjelasan hubungan kompleks antara budaya dan penggunaan tumbuhan, yaitu bagaimana tumbuhan digunakan, dikelola, dan dipersepsikan pada berbagai lingkungan masyarakat. Dalam tulisan ini penulis mengidentifikasi pengetahuan tradisional masyarakat di Sulawesi Utara yang diwakili oleh tiga etnis besar, yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Sangir, terhadap pemanfaatan berbagai jenis pohon hutan sebagai bahan baku pengobatan tradisional mulai dari jenis, bagian yang dimanfaatkan, cara pemanfaatan, dan evaluasi terhadap status kelangkaan pohon yang dimanfaatkan.

Isu yang diangkat dalam tulisan kedua adalah budaya multikulturalisme. Sebagaimana diketahui, multikulturalisme merupakan perspektif penting dalam implementasi demokratisasi di Indonesia. Multikulturalisme pada prinsipnya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan bahwa seseorang atau kelompok diakui sama di dalam ruang publik dengan segala perbedaannya. Dalam tulisan kedua ini penulis mengangkat kasus sumbangan budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme, dengan mengungkapkan pemahaman mengenai makna budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme di Indonesia dari perspektif filsafat.

Kebudayaan tidak lepas dari masyarakat yang membentuk adanya suatu budaya, yang kemudian bisa disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki pola hidup dan tujuan yang sama dalam suatu daerah. Kemunculan adat istiadat ini kebanyakan berasal dari nenek moyang, yang kemudian berlanjut sampai sekarang. Kebanyakan setiap adat yang ada menggunakan simbol-simbol serta adanya dampak bagi masyarakat yang tidak menjalankan adat yang telah dipercayai. Isu memudarnya penggunaan simbol budaya ini yang diangkat dalam tulisan ketiga. Dalam tulisannya, penulis membahas soal memudarnya stratifikasi sosial berbasis keturunan yang mengambil kasus semakin memudarnya gelar kebangsawanan karena penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual.

Sementara itu, tulisan keempat yang berjudul citra emansipasi perempuan dalam kisah mahabarata membahas simbol keperempuanan dalam dunia pewayangan. Tulisan ini difokuskan pada pemaknaan kembali peran dan kebebasan bagi perempuan modern. Penulis memaparkan simbolisme dan wujud nilai emansipasi yang terdapat pada tokoh-tokoh perempuan dalam kisah pewayangan, khususnya Mahabarata.

Berikutnya adalah dua tulisan yang bertema budaya demokrasi. Budaya demokrasi dapat dikatakan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi dalam masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Tulisan pertama dari budaya demokrasi dalam jurnal ini mengambil kasus budaya orang Papua. Penulis membahas sistem noken bukan hanya sebagai prosedur legislatif, melainkan juga seni dalam menjaga kolektivisme dan integrasi sosial. Tulisan

kedua mengangkat gagasan bagaimana kearifan local yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dapat diaktualisasikan dalam rangka membangun resolusi konflik etnik di Lampung.

Jaringan perdagangan masa lalu telah menempatkan lada sebagai salah satu komoditi utama. Jaringan perdagangan ini semakin ramai dengan kedatangan bangsa Eropa sekitar abad ke-16. Dalam konteks perdagangan global, terbentuk jaringan perdagangan yang menghubungkan dunia barat sebagai konsumen dan dunia timur sebagai penghasil komoditi. Maluku dikenal sebagai pusat produksi cengkeh dan pala (kepulauan rempah-rempah). Isu ini diangkat pada tulisan berikutnya yang berjudul Sungai Tulang Bawang dalam perdagangan lada di Lampung pada periode 1684 hingga 1914.

Tulisan kedelapan membahas Perayaan Erau di Tenggara, Kutai Kartanegara. Perayaan Erau yang didasarkan pada Kisah Putri Karang Melenu ini menunjukkan nilai-nilai simbolik tentang kehidupan masyarakatnya. Dibalik cerita tersebut, tersembunyi mitos yang sangat disakralkan oleh masyarakat, khususnya di lingkungan Kesultanan Kutai, Kalimantan Timur yang dianalisis oleh penulis dengan Teori Semiotika Pierce. Perayaan Erau tersebut dinilai memiliki empat fungsi, yaitu fungsi ekspresif, fungsi kreatif, fungsi psikologis, dan fungsi sosial.

Isu lingkungan diangkat dalam dua tulisan terakhir di edisi jurnal kali ini. Sebagaimana diketahui, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang dilaksanakannya. Namun demikian, dalam realitasnya sampai saat ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Salah satu persoalan kegagalan pemerintahan di bidang pelayanan kebutuhan air adalah persoalan gratifikasi dan integritas. Isu ini dibahas dalam tulisan yang berjudul potensi gratifikasi dalam tata kelola pelayanan publik pemanfaatan air bawah tanah di Banten.

Sementara itu, tulisan terakhir yang dimuat pada edisi kali ini berjudul relasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan hutan di Hulu Sungai Katingan, Kalimantan Tengah. Di dalam tulisan ini dipaparkan kurangnya peran pemerintah dalam pengelolaan hutan yang seolah-olah digantikan oleh perusahaan. Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi produksi dan pemasaran produk. Tulisan ini memperlihatkan dinamika masyarakat yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan mau tidak mau menerima uluran tangan perusahaan yang lebih banyak hadir di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dalam kesempatan ini, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang bersedia menyumbang tulisan yang sangat berguna dalam rangka penyebaran pengetahuan bagi para pembaca.

Selamat membaca.

**PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT SULAWESI UTARA
DALAM PEMANFAATAN POHON HUTAN
SEBAGAI BAHAN OBAT TRADISIONAL**

Diah Irawati Dwi Arini

Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado
irawati.diah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan tradisional masyarakat di Sulawesi Utara yang diwakili oleh tiga etnis besar yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow, dan Sangir terhadap pemanfaatan berbagai jenis pohon hutan sebagai bahan baku pengobatan tradisional mulai dari jenis, bagian yang dimanfaatkan cara pemanfaatan, dan evaluasi terhadap status kelangkaan pohon yang dimanfaatkan. Ditemukan sebanyak 46 jenis pohon hutan yang digunakan sebagai bahan baku pengobatan tradisional dimana kulit kayu merupakan bagian pohon yang paling banyak digunakan dalam pengobatan. Pemanfaatan masih sangat sederhana dan belum sampai pada tahap komersialisasi. Pewarisan ilmu pengobatan diperoleh secara turun temurun dan hanya secara lisan. Dari ke 46 jenis pohon diketahui hanya satu yang dikategorikan sebagai pohon terancam punah secara global yaitu *small-leaved mahogany*. Hal ini menjadikan perlunya solusi berupa budidaya tanaman agar pemanfaatan baik kayu maupun non-kayu tidak langsung mengambil dari alam namun dari hasil budidaya.

Kata kunci: Obat, pohon, hutan, tradisional, Sulawesi Utara,

**MAKNA BUDAYA TRADISIONAL BELU BAGI
MULTIKULTURALISME: TINJAUAN FILSAFAT**

Endang Retnowati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
endretno@yahoo.com

Abstrak

Masyarakat Belu merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang masih melestarikan kebudayaan tradisional mereka. Walaupun sudah ada peraturan daerah untuk meneguhkan pelestarian budaya tradisional di wilayah Belu, tetapi saat ini kebudayaan tradisional Belu dihadapkan pada tantangan budaya global. Apabila masyarakat Belu masih mempraktikkan budaya tradisional di tengah perkembangan budaya global, apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman mengenai makna budaya tradisional Belu bagi multikulturalisme di Indonesia dari perspektif filsafat. Budaya tradisional Belu merupakan warisan nenek moyang beberapa suku bangsa yang hidup di Belu dan luar Belu seperti Timor Leste, Kalimantan, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Hingga kini mereka memiliki kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai di dalamnya di atas dasar hukum. Sejak Indonesia merdeka para pendahulu kita melindungi budaya tradisional melalui konstitusi, kemudian negara turut melindungi melalui beberapa peraturan, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belu. Budaya tradisional Belu merupakan salah satu budaya yang memiliki andil bagi predikat multikulturalisme di Indonesia. Pada perkembangannya kini sebenarnya tantangan terhadap budaya tradisional datang dari budaya global yang membangun nilai hedonis-konsumeris pada generasi muda. Budaya global banyak menawarkan kemudahan-kemudahan. Dengan demikian apa makna budaya tradisional Belu di tengah budaya global bagi multikulturalisme? Artikel ini disusun berdasarkan data pustaka dan lapangan. Data kemudian ditata, dideskripsikan, dipahami, dan direfleksikan sesuai dengan kerangka pemikiran. Atas dasar itu semua ditemukan bahwa makna budaya tradisional Belu adalah sebagai jalan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Nilai-nilai di dalamnya mampu memelihara persatuan dan kesatuan di antara mereka. Pelestarian budaya tradisional, dalam hal ini pelestarian nilai-nilai tradisional yang memiliki kekuatan sebagai alat integrasi bangsa sama artinya dengan merawat multikulturalisme di tengah kehidupan global. Di sini peran setiap anggota masyarakat sebagai homo religius sangat penting. Karena itu pendidikan tentang budaya tradisional atau multikulturalisme perlu diberikan kepada generasi muda.

Kata kunci: budaya tradisional, eksistensi, multikulturalisme, budaya global

DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN

Rochmawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
rochmawatiharis@yahoo.com

Abstrak

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki masyarakat sangat heterogen. Heterogenitas sosial tersebut turut dikonstruksikan pula oleh keberadaan empat etnis besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap diri mereka sebagai kelompok "elite" karena memiliki strata sosial paling tinggi dibandingkan yang lain. Namun, stratifikasi sosial ini lama kelamaan luntur, begitu juga gelar kebangsawanan makin memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-mata didasarkan pada keturunan atau status kebangsawanan seseorang, melainkan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tulisan ini membahas dinamika kewargaan kelompok-kelompok sosial budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan Kota Makassar.

Kata kunci: dinamika sosial, kelompok sosial budaya, kewargaan, stratifikasi sosial, Kota Makassar, Bugis-Makassar.

CITRA EMANSIPASI PEREMPUAN DALAM KISAH MAHABARATA: PELURUSAN MAKNA PERAN DAN KEBEBASAN BAGI PEREMPUAN MODERN

Kartika Rahmat Sari Dewi, Andayani, Nugraheni Eko Wardhani

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
kartikarahmatsd@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan simbolisme dan wujud nilai emansipasi yang terdapat pada tokoh-tokoh perempuan dalam kisah pewayangan, khususnya Mahabarata. Sebagai bentuk konstruksi sosial, emansipasi memunculkan pemahaman baru pada kaum perempuan terkait dengan peran dan posisinya dalam ranah domestik maupun publik. Munculnya anggapan perempuan harus mampu tampil di depan publik mulai disetujui semua kalangan, namun di sisi lain mulai tidak diimbangi dengan pemenuhan tugas dalam ranah domestiknya. Hal tersebut dilatarbelakangi banyaknya pemahaman dan praktik yang keliru terkait makna peran dan kebebasan di kalangan perempuan, di mana semuanya terjadi dalam rangka mengusung persamaan hak, sebagai prinsip dasar dari adanya emansipasi. Fenomena ini berimplikasi pada munculnya kesenjangan antara ambisi untuk dapat totalitas berperan di ruang publik dan pemenuhan kewajiban personalnya di ranah domestik. Kajian berikut bertujuan untuk dapat menemukan nilai-nilai ideal yang berkaitan dengan peranan kaum perempuan, khususnya yang terkandung di dalam sastra Jawa klasik. Hasil dari kajian merupakan perbandingan antara makna emansipasi perempuan yang saat ini dianut di masyarakat, dengan konsep peranan perempuan yang terjabarkan dalam kisah Mahabarata.

Kata kunci : Perempuan, Emansipasi, Wayang.

NOKEN ELECTORAL SYSTEM IN PAPUA DELIBERATIVE DEMOCRACY IN PAPUAN TRADITION

Cahyo Pamungkas

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – LIPI
cahyopamungkas@gmail.com

Abstract

Studies of the noken system from the legal approach have been thoroughly investigated, particularly in the 2009 and 2014 elections and the 2014 presidential election in Papua. Several studies of state's law explain that the noken system is legitimate according to Indonesian laws due to cultural characteristics of Papuan following Melanesian traditions. Different from those studies, this paper examines the noken system according to Habermas' theoretical framework of deliberative democracy. This study argues that the noken system is strongly powerful as various cultural communities of native Papuans discuss it. The discussions are discursive practices and contestations to determine political decisions, such as certain political figure or political party to be voted in the election. The essence of the noken system is, therefore, a community's participation via consultations and discussions in deciding political choices collectively. Using literature review, the author discusses the implementation of the noken system in Papua province related to the concept of deliberative democracy. Findings indicate that the implementation of noken system reflects the practices of deliberative democracy, proposed by Habermas, at the village community level. In some cases, however, Papuan elites, who unilaterally decide all votes without any discussions and consent of their community, manipulate the noken system. Theoretically, the noken system shows that democracy is not only legislative procedures, but also an art of maintaining collectivism and social integration.

Keywords: noken system, deliberative democracy, Melanesian tradition, cultural democracy

PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK MENGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma & Deri Cicilia

IAIN Metro

Alumni PPs Kajian Budaya Universitas Padjadjaran
king_rachman@yahoo.com, chici_pkn09@yahoo.com

Abstrak

Konflik Semaka terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pemicunya adalah tindakan kriminal dan aksi 'main hakim sendiri'. Konflik semakin meluas karena didasari prasangka dan kecemburuan sosial yang telah mendarah-daging. Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan adalah *Ex Post Facto*. Subjek penelitian di tentukan dengan teknik *snowball sampling*, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan karakter Piil Pesenggiri itu sendiri merupakan pengejawantahan dari syariat Islam dan menjadi pilar idiologi Pancasila. Lebih lanjut lagi, penerapan falsafah Piil Pesenggiri sebagai pendekatan penanganan konflik menjadi sebuah cara yang efektif untuk menangani konflik di Semaka. Oleh karena itu, filosofi Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain.

Kata kunci: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Penanganan Konflik

SUNGAI TULANG BAWANG DALAM PERDAGANGAN LADA DI LAMPUNG PADA PERIODE 1684 HINGGA 1914

Gregorius Andika Ariwibowo
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat
andikaariwibowo@gmail.com

Abstrak

Sebelum berkembangnya era modernisasi sarana transportasi darat di Hindia Belanda, kehidupan masyarakat sejak awal abad ke-19, khususnya di wilayah Sumatera, sangat bergantung pada sungai. Salah satu sungai yang memiliki fungsi penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sumatera adalah Sungai Tulang Bawang. Kajian ini menelusuri sejarah perkembangan Sungai Tulang Bawang, terutama dalam kaitannya dengan arus perdagangan lada pada periode abad ke-17 hingga abad ke-20. Menurut Kenneth Hall, salah satu karakter peradaban sungai di Asia Tenggara adalah peradaban sungai yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan komoditas perdagangan. Kajian ini menambah wacana dalam kajian sejarah maritim Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perdagangan lada. Sungai Tulang Bawang mengalami kemunduran akibat semakin dominannya perkembangan transportasi darat pada awal Abad ke-20 di Sumatera.

Kata kunci: Sungai Tulang Bawang, Sejarah Sungai, Sejarah Sumatera, Perdagangan Lada

FUNGSI SIMBOLIK PERAYAAN ERAU DI TENGGARONG (KAJIAN SEMIOTIKA)

Ulum Janah
Fakultas Sastra, Universitas Balikpapan Kalimantan Timur
ulum.jannah@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Penelitian “Fungsi Simbolik Perayaan Erau di Tenggarong” merupakan penelitian lapangan. Objek penelitian ini adalah Perayaan Erau. Erau menunjukkan identitas masyarakat dan menunjukkan rasa persatuan di wilayah Kutai melalui fungsi simbolis perayaan tersebut. Untuk menganalisis prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik milik Peirce. Hasilnya menunjukkan kegiatan dalam perayaan Erau di Tenggarong memiliki makna simbolis bagi masyarakat pemilik adat untuk mengkonfirmasi identitasnya. Selain itu, simbol juga berfungsi sebagai bentuk ekspresif, kreatif, psikologi, dan sosial bagi masyarakat adat maupun masyarakat umum di Tenggarong. Simbol tersebut menggambarkan orang pertama dan pemimpin di Kutai yang memiliki struktur berupa elemen-elemen yang saling terkait antara pemilik adat, dalam hal ini dari pihak kesultanan dan masyarakat sekitar.

Kata kunci: Erau, simbol, semiotik Peirce, fungsi

POTENSI GRATIFIKASI DALAM TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI BANTEN

Dede Wardiat

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
dewadetaris@yahoo.com

Abstrak

Hampir disetiap daerah tampaknya organisasi perangkat daerah yang ada tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah satu sumber daya lokal, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan cenderung semakin kabur. Kondisi ini membawa implikasi luas terhadap pelayanan publik dan dalam beberapa fase proses perizinan menunjukkan potensi gratifikasi yang tinggi. Ruang gratifikasi dalam kasus pajak air tanah terbuka lebar manakala perusahaan pengguna sumur bor melakukan pelanggaran, baik pelanggaran teknis, maupun pelanggaran yang bersifat administratif. Upaya menekan tingkat gratifikasi yang terjadi selama ini harus dimulai dari ketegasan peraturan perundangan, mulai tingkat pusat hingga daerah. Paradigma tentang kandungan air dalam suatu akifer merupakan kesatuan dengan akifer lainnya didalam keseluruhan lapisan tanah yang ada harus ditegaskan dengan jelas, sehingga penentuan zona kritis (zona merah) menjadi mutlak sebagai daerah terlarang untuk diambil airnya. Dengan kebijakan yang tegas seperti ini peta zonase yang dibuat memberi makna terhadap pengendalian dalam pemanfaatan air tanah. Seiring dengan itu penggunaan meteran air sebagai alat ukur penggunaan air tanah mutlak diwajibkan kepada seluruh wajib pajak, hal ini diikuti dengan penataan ulang proses pencatatan meteran dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terintegrasi dalam satu sistem manajemen pemerintahan daerah yang akuntabel.

Kata kunci : Tata Kelola Pemerintahan, Korupsi, Gratifikasi, Pemanfaatan Air Tanah

RELASI MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN SARI BUMI KUSUMA (SBK) DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI HULU SUNGAI KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH

Mohammad Fathi Royyani¹, Abdul Sukur², dan Oscar Efendy¹

¹. Pusat Penelitian Biologi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

². Universitas Islam Negeri Gunung Djati, Bandung
moha036@lipi.go.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan relasi antara masyarakat dan perusahaan kehutanan yang memiliki izin konsesi di Kalimantan Tengah. Terdapat masyarakat yang sudah lama tinggal di dalam kawasan konsesi tersebut. Diantara bentuk relasi antara kedua pihak adalah adanya kesepakatan bahwa swasta memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial juga sebagai ruang baru bagi swasta untuk berelasi dengan masyarakat. Dengan menggunakan konsep-kritis tentang negara, artikel ini berusaha menjelaskan cara perusahaan berperan sebagai negara pada satu sisi sedangkan di sisi lain tetap berorientasi keuntungan. Melalui pembahasan mengenai program-program yang diberikan, artikel ini berargumen bahwa peran-peran swasta dalam memberdayakan dan membangun masyarakat adalah bagian dari sistem produksi.

Kata kunci: Hutan, Transformasi Masyarakat, Marjinal, Pemberdayaan, Swasta.

